

**TESIS**  
**PELAKSANAAN FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM  
TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**RESTY LISTYANINGRUM**

**(1520112058)**

**Dosen Pembimbing:**

1. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., L.LM
2. Dr. Khairani, S.H., M.H.

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**2020**

**PELAKSANAAN FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM  
TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI  
SUMATERA BARAT**

Resty Listyaningrum. 1520112058. Program Pascasarjana Magister  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Pidana, 117 Halaman, Tahun 2020

**ABSTRAK**

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu pertama bagaimanakah fungsi dan mekanisme kerja Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2019. Kedua, bagaimanakah pelaksanaan fungsi Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2019 di Sumatera Barat. Pendekatan penelitian ini bersifat empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun data dikumpulkan dengan wawancara dan studi atas bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, fungsi Sentra Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dengan mekanisme kerja dimulai dengan adanya penerimaan laporan dan temuan dugaan suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, pelaksanaan fungsi Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2019 di Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Dari seluruh temuan dan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang masuk kepada Sentra Gakkumdu di Sumatera Barat berdasarkan kajian dan pembahasan serta rapat pleno dan hasil penyelidikan terdapat 101 kasus yang merupakan tindak pidana. Dari kasus tersebut, 17 kasus telah disidangkan dan diputus oleh pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar koordinasi antara aparat penegak hukum yang terwujud dalam Sentra Gakkumdu dapat lebih ditingkatkan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya agar semua laporan dan temuan dapat diproses serta pemerintah dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu sebab sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Kata kunci: pemilu, tindak pidana pemilu, sentra penegakan hukum terpadu

## **IMPLEMENTATION OF INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER (GAKKUMDU) IN THE HANDLING OF CRIMINAL GENERAL ELECTION IN 2019 IN WEST SUMATERA**

Resty Listyaningrum. 1520112058. Postgraduate Masters Program in Law, Andalas University Faculty of Law, Criminal Law Specialization Program, 117 Pages, 2020

### **ABSTRACT**

Gakkumdu as an integrated law enforcement center has an important role in handling election criminal acts. In Article 486 point (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Election, the Gakkumdu establishment is explicitly intended to equalize the understanding and pattern of handling election criminal acts by the Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. There are 2 (two) problems in this research, firstly how the function and mechanism of the Gakkumdu Center in handling 2019 Election crime. Second, how the implementation of the Gakkumdu Center function in law enforcement in 2019 Election in West Sumatra. This research approach is empirical (sociological juridical) with a statutory approach. The data was collected by interviews and studies on primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that first, the function of the Gakkumdu Center was to equalize the understanding and pattern of election crime handling between the Election Supervisory Body, the Police and the Prosecutor's Office with the mechanism of work starting with the receipt of reports and findings of alleged acts which allegedly constituted an election criminal act which had been regulated in the Act Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. Second, the implementation of the function of the Gakkumdu Center in law enforcement for the 2019 Election in West Sumatra is carried out under the Election Law and Bawaslu Regulation No. 31 of 2018 concerning the Gakkumdu Center. From all findings and reports of alleged election crimes that came to the Gakkumdu Center in West Sumatra based on studies and discussions as well as plenary meetings and the results of the investigation there were 101 cases that constituted criminal acts. Of these cases, 17 cases have been tried and decided by the court. Thus, this study recommends that coordination between law enforcement officers manifested in the Gakkumdu Center be further improved for the implementation of subsequent elections so that all reports and findings can be processed and the government can increase the active role of the community in overseeing the implementation of elections because it is needed to realize quality elections .

Keywords: elections, election crime, integrated law enforcement centers